BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah hubungan antar negara satu dengan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan nasional negaranya masing-masing. Istilah dari hubungan internasional sendiri diciptakan oleh Jeremy Bentham, seseorang yang mempunyai minat yang begitu besar terhadap hubungan antar negara (Darmayadi, 2016 : 22). Negara yang merdeka satu sama lain, paling tidak mereka secara hukum memiliki kedaulatan. Tetapi bukan berarti mereka terpisah satu dengan yang lain, sebaliknya mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan Internasional merupakan studi tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan tersebut (Darmayadi,2016:41).

Hubungan Internasional dalam beberapa perdebatan sengit telah berkembang sebagai ilmu. Satu dekade lalu hubungan internasional mungkin masih di bagi dalam empat perspektif utama : *Realisme, Liberalisme, Marxisme, Konstruktivisme*. Namun pada dekade berikutnya tidak hanya pendekatan ini yang berkembang ke arah yang baru , beberapa hal tentang teori *kritis, paradigm modernism, post modernism* telah bergabung sebagai ‘isme’ baru yang bersaing untuk menarik perhatian, termasuk Gender dan feminisme dan serta konsep baru *konstruktivisme* (Ikbar,2014:155).

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengar perkembangan dalam bidang-bidang studi lain. Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidangbidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, eksistensinya secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasioanal yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi, 2015:17-18).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor dalam kajian studi hubungan internasional. Organisasi internasional sangat perhatian akan interaksi antar negara dan antar non-negara dalam suatu wadah yang berstruktur dan mempunyai fungsi (Ikbar, 2014 : 239).

Organisasi internasional adalah aktor internasional selain negara, ada hubungan yang saling ketergantungan antara organisasi dan negara. Eksistensi dan *Output* organisasi internasional dapat membuat perubahan dalam perilaku negara. Tetapi perilaku yang ditimbulkan beragam berdasarkan dimensi yang berbeda (Triwahyuni,2010:2).

Awal organisasi internasional ini terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian. Organisasi internasioanl dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu perikatan antara subjek yang melintas batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama (Ikbar, 2014 : 240).

Organisasi internasional menjadi satu bagian dalam Hubungan Internasional, organisasi Internasional menurut D.W. Boweet organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuah traktak (kesepakatan) yang lebih bersifat *multilateral* daripada *bilateral* dengan tujuan-tujuan tertentu. *Organizations* dalam kata international organizations sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu *organization*. Dalam hal ini dijelakan bahwa organization adalah suatu proses sedangkan organisasi internasional adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu proses tertentu (Perwita & Yani, 2005:92).

Dalam suatu organisasi internasional, diharapkan tercipta suatu tatanan hubungan yang kuat dalam waktu-waktu tertentu yang dapat menggambarkan kualitas dari institusi tersebut melalui pengamatan terhadap setiap tingkah laku mereka, organ-organ politik dan struktur birokrasi serta tampilan fisik dan simbolik (Ikbar;2014;242)

Bentuk organisasi internasional yaitu : *IGO (Inter Govermental Organization), dan NGO (Non Govermental Organization).* Jika dilihat dari dua bentuk organisasi internasional yang ada maka *UN Women* termasuk dalam bentuk IGO (*Inter Govermental Organization*). *UN Women* adalah organisasi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai juara global untuk perempuan dan anak perempuan, *UN Women* didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia.

UN Women mendukung Negara-negara Anggota PBB ketika mereka menetapkan standar *global* untuk mencapai kesetaraan Gender, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Ini berfungsi secara *global* untuk membuat visi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi kenyataan bagi perempuan dan anak perempuan dan mendukung partisipasi yang setara dari perempuan dalam semua aspek kehidupan*(http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women*, diakses 11 April 2018).

2.1.3 Peranan Organisasi Internasional

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan

demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui Karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Kemudian peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam orisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan mejalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau konsep lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial (Perwita,dkk,2005: 31).

Peran organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: 1. sebagai instrument, Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negrinya. 2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas msalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk

mendapat perhatian internasional. 3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Clive Archer dalam Perwita & Yani, 2005:95).

2.1.4 Kajian Gender dalam Hubungan Internasional

Untuk memahami perbedaan konsep Gender, kata Gender harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep Gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2016 : 8)

Kajian tentang *feminisme* dan hubungan internasional sesungguhnya telah berkembang selama lebih dari tiga dekade. Subkajian tentang Gender dan hubungan internasional bermula dari suatu konferensi internasional diakhir tahun 1980-an dan di tahun 1990 yang diselenggarakan di Amerika serikat (Soetjipto, 2013 : 1). *Feminisme* adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan laki-laki, tokohnya disebut *feminis*. *Feminisme* berasal dari Bahasa latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. *Feminis* menitik beratkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya *hegemoni patriaki*. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh *feminis* diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena segala upaya *feminis*

bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup.

Timbulnya gerakan *feminis* merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan (Ikbar, 2014 : 386). *Feminisme* secara luas dapat didefinisikan sebagai gerakan kemajuan sosial kaum perempuan. Maka, teori *feminis* didasarkan pada dua keyakinan utama : perempuan mengalami ketidakberuntungan karena jenis kelaminnya; dan ketidakberuntungan ini dapat dan harus dihilangkan. Jika melihat dari buku-buku mengenai Gender dan hubungan internasional, maka akan didapati banyak pemikir-pemikir *feminis*, yang dengan analisi mereka yang bernas serta tulisan yang menyentak, mengupas bagaimana pendekatan dalam hubungan internasional yang dikaji lewat lensa yang kritis seperti *feminisme*. Jean B.Elshtain, Cynthia Enloe, dan J. Ann Tickner, adalah beberapa pemikir yang bisa dikatakan mempelopori atau menjadi pionir awal kajian hubungan internasional lewat *feminis* (Soetjipto, 2013 : 16).

Gender mengalami perkembangan sehingga hubungan internasional tidak mungkin terhindar dari pembahasan mengenai Gender. Artinya, Gender telah menjadi bagian dari kajian studi HI saat ini. Seperti yang dikatakan oleh beberapa teori *feminisme* bahwa perang dan perdamaian merupakan simbiosis antar petarung dengan korbannya. Sikap jantan/*maskulin* dan *feminim* dalam susunannya akan saling mengimbangi dan keduanya digunakan untuk menciptakan perang. Sementara perdamaian akan lebih mudah diciptakan dengan *feminisme*, dimana perempuan secara moral lebih unggul dibandingkan laki-laki. Sehingga pandangan HI yang didominasi oleh mahzab realis yang mengatakan

bahwa negara cenderung lebih memerlukan sifat-sifat maskulin perlu dipertanyakan.

2.1.4.1 Gelombang Pertama Kajian Perempuan dan Hubungan Internasional

Perkembangan Gender pada tahap pertama ini masih belum begitu kelihatan karena pada gelombang pertama ini seakan-akan memperlihatkan bahwa negara adalah satu-satunya entitas terpenting dalam hubungan internasional, peserta/ partisipan dalam politik internasional ini adalah negarawan atau prajurit. Sehingga jika ada perempuan yang ikut serta dalam politik internasional maka keberadaannya tidak akan dianggap penting dan signifikan dalam memahami fenomena politik internasional. Dalam kajian politik internasional secara tradisional berfokus pada negara dan hubungan antar negara. Dalam cara pandang dan fokus seperti ini, perempuan absen atau tidak terlihat atau dibicarakan. Alasannya, tidak banyak perempuan yang dapat menjadi pemimpin negara, hanya beberapa saja yang menjadi pengecualian. Gelombang pertama kajian tentang perempuan dan politik internasional memiliki karakter tulisan yang belum mengugat mainstream adding. Penulis yang menjadi pionir dari generasi ini adalah Jean Bethke Elsthain dengan bukunya *Women and War* (Soetjipto, 2013 : 18).

2.1.4.2 Gelombang Kedua Kajian Tentang Gender dan Politik Internasional

Gelombang kedua kajian Gender dan politik internasional berkembang pasca-perang dingin di akhir tahun 1989. Para pemikir mulai mempertanyakan kegunaan mempelajari perspektif realis dan studi keamanan internasional untuk menganalisis dunia pasca-perang dingin. Penulis dari gelombang kedua adalah

J.Ann Tickner dengan bukunya Gender *in Internasional Relation* (1992). Dalam kajian gelombang kedua tentang Gender dan politik internasional, perdebatan tentang beragam *perspektif feminis* menjadi landasan perdebatan dan diskursus seputar Gender dan politik internasional (Soetjipto;2013;20-21).

2.1.4.3 Gelombang ketiga tentang Feminisme dan Hubungan Internasional

Periode saat ini masuk setelah 30 tahun perkembangan kajian *feminisme* dan hubungan internasional. Kajian *feminisme* dan hubungan internasional telah memberi banyak sumbangan signifikan, terutama dalam mengintegrasikan analisis Gender dalam riset-riset mainstream tentang hubungan internasional. Gender sebagai konsep utama dalam analisis tentang politik internasional tidak saja berkembang di ranah intelektual pengajaran dan riset; tapi juga semakin banyak pemerintah dan organisasi internasional yang menjadikannya sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan (Soetjipto, 2013 : 21-22). Pengaruh dari pemikiran semacam ini dapat dilihat dalam pengadopsian terutama sejak dekade perempuan PBB atau *UN Women* (1976-85), Gender *mainstreaming* oleh perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri dan badan-badan lain seperti World Bank. Namun, meskipun menambahkan perempuan/add women memperlihatkan bahwa perempuan selalu relavan dengan aktivitas-aktivitas politik Internasional (Heywood, 2016 : 752).

Dilihat dari pandangan-pandangan dalam hubungan internasional mengenai Gender yang pertama dalam pandangan *realis,liberal,dan kritis.* Pandangan *Realis* mengenai Gender : tidak ada teori realis tentang Gender, kalangan *realis* biasanya memandang hubungan-hubungan Gender tidak relavan

dengan urusan-urusan internasional dan global. Karena para pelaku utama dalam panggung dunia adalah negara-negara, yang perilakunya di bentuk oleh pemikiran tentang kepentingan nasional dan fakta bahwa dalam sebuah sistem internasional yang anarki, mereka dipaksa untuk memprioritaskan keamanan diatas pertimbangan-pertimbangan lain.

Pandangan liberal mengenai Gender : kalangan liberal telah lama memiliki perhatian pada persoalan kesetaraan Gender, bahkan *feminisme* liberal merupakan ajaran *feminisme* paling awal, landasan *filosofis* dari *feminisme liberal* terletak pada prinsip *individualisme*, *individu-individu* berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Tanpa memandang Gender, ras, warna kulit, keyakinan atau agama. Kalangan *liberal* biasa berasumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki watak dan kecenderungan yang berbeda (Heywood, 2016 : 756).

Pandangan liberal inilah yang sekarang dipakai oleh pemerintah Tiongkok dalam sistem ekonomi Tiongkok, perubahan sistem ekonomi ini sangat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan Gender. Jika ekonomi di suatu negara berkembang dengan pesat maka kesetaraan gender juga akan berkembang kearah yang lebih baik, dengan berkembanganya ekonomi suatu negara maka peluang untuk pendidikan yang meratapun semakin banyak dan perempuan juga bisa dapat pendidikan yang layak.

Pandangan-pandangan kritis mengenai Gender : teori-teori *kritis* tentang politik *global* melibatkan pemikiran *feminis* dan *perspektif-perspektif* Gender dengan sejumlah cara yang berbeda. *Konstruktivisme* sosial memberi pengaruh signifikan pada konsep-konsep feminis radikal awal tentang Gender, yang

memberikan penekanan besar pada proses sosialisasi yang berlangsung dalam keluarga. Gender karenanya merupakan gagasan sosial yang berbeda dari seks yang bersifat biologis (Heywood, 2016 : 757).

Dalam Gender juga ada kelas, kelas merupakan konsep utama yang digunakan dalam sosiologi untuk meneorikan ketidaksetaraan sosial. Oleh karenanya konsep ini layak untuk mempertanyakan secara sistematis apa hubungan jika ada kelas dan Gender. Pertama, penentuan perbedaan antar kategori kelas dan alokasi orang-orang kedalamnya. Kedua, pemahanman mengenai mobilitas kelas pada politik, atau kelas, aksi dan kesadaran sosial. Goldthorpe (1983) berpendapat bahwa perempuan dapat diabaikan dalam analisis kelas karena posis mereka ditentukan oleh laki-laki dengan siapa mereka hidup, baik suami atau ayah mereka. Dia menyatakan bahwa pekerjaan perempuan terlalu terbatas, musiman, dan bersyarat oleh karena suami mereka. Dia juga menyatakan keluar masuknya perempuan dalam pekerjaan berkaitan dengan hal-hal domistik dan pekerjaan suami mereka (Walby, 1990 : 12).

Beberapa *feminis* telah mengkaji masalah Gender dan kelas dari sisi berlawanan dengan yang didiskusikan sejauh ini. Ketimbang mempersoalkan bagaimana kita dapat menjejalkan isu perempuan dalam analisis kelas (Walby, 1990 : 15). Setelah melihat dari setiap perkembangan Gender di dalam Hubungan internasional, dan juga pengertian-pengertiannya. Dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional juga ikut serta dalam memajukan Gender dalam setiap pandangan-pandangan hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, aktor politik dunia bukan hanya negara, namun juga aktor non negara seperti

organisasi internasional dan aktor privat. Fenomena meningkatnya kiprah aktor non negara dalam hubungan internasional juga dapat dilihat dari ledakan perwakilan *NGOs* yang menghadiri konfersi tentang perempuan (Soetjipto, 2013 : 40).

Dalam konteks konflik, perempuan sebagai bagian dalam masyarakat dan fenomena sosial tidak luput dan cenderung berada dalam posisi rentan. Hal inilah yang membuat perempuan juga terlibat dalam konflik-konflik yang terjadi di masyarakat bahkan lebih sering mengalami ketidakadilan dan juga menjadi korban dari konflik yang terjadi.

Ada berbagai bentuk ketidakadilan Gender yang terjadi pada perempuan yaitu perempuan sering dinomorduakan seperti perempuan yang selalu di anggap orang belakang yang selalu di nomorduakan dalam hal politik, karir, jabatan, dan pendidikan. Perempuan juga sering diberi pelabelan negatif, contohnya perempuan dianggap mudah dibeli dengan uang dan laki-lakilah yang berkuasa. Kekerasan juga kerap terjadi pada perempuan seperti halnya yang sering didengar yaitu penyiksaan dan pemukulan terhadap istri, perkosaan, dan pelecehan seksual yang terjadi membuat ketidakadilan bagi perempuan. Perempuan juga mempunyai beban ganda, perempuan harus bekerja didalam rumah dan diluar rumah, dan istri harus bekerja mengurus anak, menyediakan makanan, dan mengurus rumah tangga. Begitupun perempuan mengalami peminggiran dalam upah kerja yang jauh lebih kecil dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan juga jika perempuan mau mengambil kredit harus dengan persetujuan suaminya namun tidak sebaliknya (Gultom, 2012 : 79). Oleh karena itulah banyak usaha yang

dilakukan oleh pemikir-pemikir feminis untuk menyetarakan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Kesetaraan Gender adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antar laki-laki dan perempuan. Keadilan Gender adalah suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat (Gultom;2012;80).

2.2 Kerangka Pemikiran

Permasalahan Gender yang terjadi di Tiongkok masih begitu terlihat sekarang ini dilihat dari pengertian kesetaraan Gender yaitu persamaan fungsi dan peran. Peranan perempuan Tiongkok tidak begitu terlihat dikarenakan sejak kecil perempuan Tiongkok tidak bisa bebas berpendapat dan juga harus mendapatkan izin ketika mau melakukan apapun.

Masih banyak juga perempuan Tiongkok yang tinggal di pedesaan belum mendapat peranan yang sama dikarenakan lebih lagi dikucilkan ketika di hidup didesa. Penurunan tingkat partisipasi tenaga kerja wanita perkotaan telah menjadi jelas pada 1990-an. Pada saat itu, sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional, Tiongkok telah mem-PHK puluhan juta pekerja perusahaan milik negara. Proporsi wanita yang diberhentikan jauh lebih tinggi daripada pria. Banyak pekerja yang kembali bekerja di akhir tahun juga jauh lebih rendah daripada pria.

Pada waktu yang hampir bersamaan, gerakan "perempuan kembali ke keluarga" muncul, menyerukan pengunduran diri perempuan pada saat tingkat pengangguran meningkat dan menyerahkan jalan bagi laki-laki. Setelah bertahun-

tahun, sikap ini berakar kuat: konsep tradisional tentang peran Gender sekali lagi menjadi lazim.

Kesetaraan Gender di Tiongkok bisa dikatakan mulai berkembang tahun-tahun ini namun perkembangan yang dialami oleh Gender di Tiongkok sendiri hanya berkembang sedikit demi sedikit. Perkembangan Gender di Tiongkok dipicu oleh perubahan sistem ekonomi negara, dimana Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping merubah sistem ekonominya dari sosialis ke liberalis. Sehingga perempuan dapat mengalami kemajuan dalam ekonominya dan juga pekerjaan.

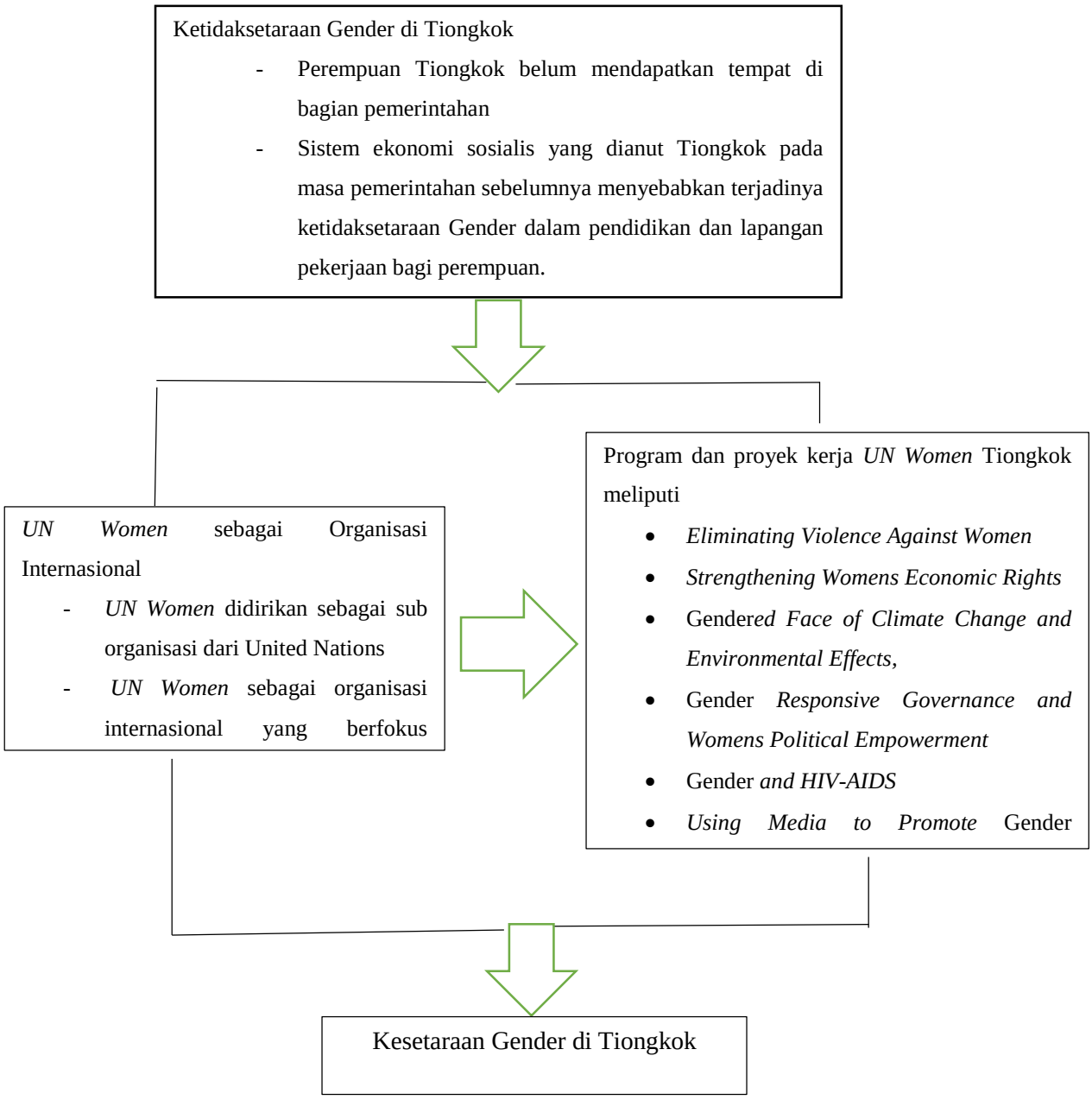
Untuk itulah berdirilah *UN Women*, Untuk dapat mencapai tujuan, *UN Women* menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).* Berikut adalah peran utamanya:

1) Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Comission on the Status of Women (CSW)*, dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.

2) Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis maupun keuangan yang cocok untuk Negara negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.

3) Untuk memungkinkan Negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetraan Gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara

keseluruhan.*UN Women* mempunyai program-program serta kegiatan-kegiatan yang di lakukan, untuk membantu pemerintahan Tiongkok dalam menegakkan kesetaraan Gender di Tiongkok.



Gambar 2.1 Bagan kerangka pemikiran